

## Didampingi Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Dorong Integrasi Perikanan dan Wisata di Teluk Lande, Targetkan Pelabuhan Perikanan Buton Selatan Aktif



Didampingi Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Dorong Integrasi Perikanan dan Wisata di Teluk Lande

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Kawasan Teluk Lande di Kabupaten Buton Selatan dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi pesisir terpadu berbasis perikanan dan pariwisata. Penilaian itu mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, ke Desa Lande, Kecamatan Sampolawa, Sabtu

Potensi tersebut terlihat dari karakter perairan yang relatif tenang, panorama tebing yang eksotis, serta keberadaan destinasi

Lanjut ke Hal: 7

## Tangani Perdata dan TUN, Pemkab Buton Selatan Gandeng Kejari Buton Teken MoU



Laporan: Andina L

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Buton dalam penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU), Kamis (26/3/2026).

Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang

transparan dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penandatanganan berlangsung di Desa Gaya Baru, Waburi Park, Kecamatan Lapandewa, dan dirangkaikan dengan kegiatan penerangan hukum yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Se-

latan. Dalam kerja sama tersebut, ruang lingkup yang disepakati meliputi bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, penegakan hukum bidang perdata, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum dalam rangka penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Selain itu, kedua pihak juga sepakat mening-

Lanjut ke Hal: 7

## Tradisi Kande-Kandea Buton Tengah Kembali Digelar Pasca Lebaran di Lapangan Lamedadi, 200 Talang Disajikan



Laporan: Firman

BUTON TENGAH, BP-Tradisi Kande-Kandea yang digelar masyarakat Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, kembali menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi warga pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Lamedadi, Sabtu (28/3/2026), itu menghadirkan sekitar 200 talang berisi hidangan tradisional

yang disiapkan oleh masyarakat sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong.

Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ajang makan bersama, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk, terutama setelah perayaan hari besar keagamaan.

Ketua Panitia Kande-Kandea Tolandona 2026, Zamiluddin, mengatakan tingginya partisipasi warga menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat

dalam menjaga warisan budaya lokal.

"Kehadiran 200 talang tahun ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat masih sangat antusias melestarikan tradisi leluhur," ujarnya.

Rangkaian kegiatan Kande-Kandea tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilanjutkan pada malam hari melalui tradisi Kande Tompa yang menjadi bagian integral dari budaya

Lanjut ke Hal: 7

## Sultra Target 400 Rumah Layak Huni, Gubernur ASR Tinjau Model di Makassar



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan pembangunan 400 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada 2026. Target tersebut diperkuat setelah Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, meninjau langsung model hunian modern di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Jumat (27/3/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi per-

cepatan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan efisien. Pemerintah daerah melihat pendekatan pembangunan rumah modular sebagai solusi adaptif untuk wilayah terpencil di Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Kehadiran

lintas pejabat ini menegaskan pentingnya sinergi antardaerah dan pemerintah pusat.

Kawasan yang ditinjau merupakan proyek hunian yang dibangun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedikitnya 20 unit rumah telah berdiri dan dihuni oleh warga sasaran program.

Rumah-rumah tersebut

Lanjut ke Hal: 7

## Didampingi Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Dorong Integrasi Perikanan dan Wisata di Teluk Lande, Targetkan Pelabuhan Perikanan Buton Selatan Aktif

wisata seperti Waburi Park yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, bersama jajaran pejabat provinsi dan kabupaten. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi terpadu.

Fokus utama kunjungan adalah peninjauan Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Gerak Makmur. Program ini dirancang sebagai penggerak ekonomi baru bagi masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan dan akses pasar.

Hugua menegaskan bahwa keberhasilan KNMP sangat bergantung pada optimalisasi infrastruktur pendukung, khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Menurutnya, fasilitas tersebut harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan secara efektif.

“Tidak perlu pen-

gadaan mesin baru, cukup dilakukan penyempurnaan agar operasionalnya lebih optimal,” ujar Hugua dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan ikan di kawasan Teluk Lande mencapai sekitar 15 ton per hari, sementara produksi yang tersedia baru sekitar 3 ton. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan kapasitas produksi perikanan.

“Kita melihat ada gap yang cukup besar antara kebutuhan dan produksi. Ini harus segera diatasi melalui penguatan sistem produksi dan distribusi,” katanya.

Upaya tersebut, lanjutnya, juga harus didukung dengan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur strategis. Pelabuhan dinilai penting untuk menunjang aktivitas nelayan, termasuk distribusi hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas.

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar diharapkan dapat kembali dilanjutkan.

Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan langkah koordinasi lanjutan.

“Program ini sudah pernah disetujui, tinggal kita dorong kembali agar bisa direalisasikan,” ujarnya.

Secara historis, sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah menjadi tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Program modernisasi perikanan mulai digencarkan pada era 1970-an melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan penguatan armada tangkap.

Dalam konteks global, konsep pengembangan kampung nelayan terpadu seperti KNMP sejalan dengan praktik di sejumlah negara maritim, seperti Jepang dan Norwegia, yang mengintegrasikan sektor perikanan dengan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir.

Di Indonesia sendiri, pengembangan kawasan berbasis ekonomi biru (blue economy) semakin diperkuat dalam satu dekade terakhir sebagai strategi nasional dalam menjaga

keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hugua menilai, Teluk Lande memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan kawasan pesisir di tingkat regional bahkan nasional, jika didukung dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor.

“Integrasi antara perikanan dan pariwisata adalah kunci. Jika ini berjalan baik, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan KNMP, termasuk mendorong investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan langkah tersebut, kawasan Teluk Lande diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. (\*)

## Sultra Target 400 Rumah Layak Huni, Gubernur ASR Tinjau Model di Makassar

konsep knock down atau bongkar pasang menggunakan material panel PVC. Dengan tipe 36, hunian ini menawarkan desain sederhana, modern, dan efisien dalam proses konstruksi maupun biaya.

Model pembangunan ini dinilai relevan untuk diterapkan di daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas seperti di Sulawesi Tenggara. Selain cepat dibangun, rumah modular juga memudahkan distribusi material ke lokasi terpencil.

“Kita melihat langsung desain dan penataan kawasan ini sebagai referensi penting. Model seperti ini sangat memungkinkannya untuk diterapkan di daerah kita,” ujar Andi Sumangerukka di sela kunjungan.

Ia menambahkan, Pemerintah Sultra telah menyiapkan anggaran untuk membangun 400 unit rumah layak huni tahun ini yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Upaya tersebut juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Gubernur membuka peluang kerja

sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna mengadopsi konsep pembangunan yang dinilai efektif tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sultra, Parinringi, menyebut pihaknya telah mendapatkan instruksi untuk segera melakukan koordinasi teknis. “Kami akan menindaklanjuti arahan Gubernur dengan membangun komunikasi intensif bersama Kemensos,” katanya.

Kunjungan ini juga menyentuh sisi sosial yang lebih luas. Salah satu rumah yang dikunjungi merupakan milik keluarga Naila, murid sekolah rakyat yang menjadi simbol nasional program pengentasan kemiskinan pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Rumah ini sangat membantu kami. Dulu kami tinggal di kondisi yang tidak layak, sekarang jauh lebih baik,” ujar salah satu warga dalam dialog singkat bersama rombongan.

Secara historis, program perumahan rakyat di Indonesia telah berkembang sejak era Orde Baru melalui Perumnas hingga program sejuta rumah yang dicanang-

kan pemerintah pada 2015. Program tersebut menjadi tonggak dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di tingkat global, konsep rumah modular dan prefabrikasi telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Jepang dan negara-negara Eropa untuk mengatasi kebutuhan hunian cepat pascabencana maupun urbanisasi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menekan biaya dan waktu pembangunan.

Dengan mengadopsi praktik serupa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program pembangunan 400 rumah layak huni tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari kebijakan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan dialog bersama warga setempat guna menyerap aspirasi dan memastikan bahwa program perumahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (\*)

## Tangani Perdata dan TUN, Pemkab Buton Selatan Gandeng Kejari Buton Teken MoU

daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi hukum, serta melakukan audit hukum dan mitigasi risiko guna mencegah potensi pelanggaran di masa depan.

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara,” ujar Adios dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap aset daerah menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama tersebut. “Kami ingin memastikan seluruh

aset daerah terlindungi secara hukum dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buton menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah melalui peran Jaksa Pengacara Negara.

“Kami siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah secara profesional dan sesuai aturan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PPK Buton Selatan Hj. Sitti Norma Adios, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, serta unsur pemerintah kecamatan setempat.

Rangkaian acara

diawali dengan prosesi penyambutan tamu melalui pengalungan bunga dan tarian tradisional, yang mencerminkan kearifan lokal sekaligus penghormatan kepada para undangan.

Secara historis, kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara telah lama menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, peran Jaksa Pengacara Negara semakin diperkuat dalam mendampingi instansi pemerintah.

Di tingkat nasional, praktik serupa telah banyak dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah guna menekan potensi kerugian negara dan meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan anggaran dan aset.

Secara internasional, konsep pendampingan hukum oleh institusi negara terhadap pemerintah daerah juga diterapkan di berbagai negara, seperti melalui office of government legal advisors di negara-negara Eropa yang berfungsi memberikan legal opinion dan perlindungan hukum bagi kebijakan publik.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta meminimalkan risiko hukum dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (\*)

## Tradisi Kande-Kandea Buton Tengah Kembali Digelar Pasca Lebaran di Lapangan Lamedadi, 200 Talang Disajikan

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Kepala Kepolisian Resor Buton Tengah Kopol Nursaji, S.H., Komandan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 870 Sangia Wambulu Letkol Inf. Andi Gumilang, serta mantan Bupati Buton Tengah H. Samahuddin, S.E.

Kehadiran unsur TNI dan Polri sekaligus memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Panitia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan aparat keamanan selama acara berlangsung.

Zamiluddin menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dari Kelurahan Tolandona dan Desa Tolandona Matanaeo menjadi faktor utama suksesnya kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik,” katanya.

Ia juga berharap tradisi Kande-Kandea dapat terus berkembang dan menjadi agenda budaya berskala nasional di masa mendatang.

“Ke depan, kami berharap kegiatan ini semakin meriah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Secara historis, tradisi makan bersama seperti Kande-Kandea memiliki kesamaan dengan berbagai tradisi di Nusantara, seperti ‘emegibung’ di Bali dan ‘ekenduri’ di Sumatra, yang menekankan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Bahkan secara global, tradisi komunal serupa juga ditemukan dalam budaya masyarakat dunia, seperti ‘potluc’ di Amerika Serikat atau ‘harvest festival’ di Eropa, yang menandai rasa syukur sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Di Indonesia, pelestarian tradisi lokal menjadi bagian

penting dari agenda kebudayaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendorong masyarakat menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi.

Dalam konteks lokal, Kande-Kandea tidak sekadar seremoni, tetapi juga refleksi nilai gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Tolandona selama bertahun-tahun.

Panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan, sekaligus berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada penyelenggaraan berikutnya.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, tradisi Kande-Kandea diharapkan tetap menjadi perekat sosial sekaligus identitas budaya masyarakat Buton Tengah di masa mendatang. (\*)

## Iran Pilih Pakistan dan Turki, DPR RI Soroti Arah Diplomasi Global

## DPR Minta WFH Tak Dilakukan Senin dan Jumat, Ini Alasannya



Iran Lebih Pilih Pakistan Jadi Mediator, DPR RI Buka Suara

Perang Iran vs Israel dan AS

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Dinamika diplomasi internasional kembali menghambat setelah Iran disebut lebih memilih Pakistan dan Turki sebagai mediator dalam komunikasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut menandai upaya baru meredakan ketegangan politik di kawasan Timur Tengah yang selama ini berulang kali me-manas akibat konflik geopolitik berkepanjangan.

Iran Iran dilaporkan membuka ruang komunikasi tidak langsung dengan Amerika Serikat melalui perantara, alih-alih perundingan langsung, terutama terkait ketegangan politik yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Pakistan Pakistan dan Turki Turki kemudian disebut memainkan peran penting sebagai jalur penghubung diplomatik. Pakistan bahkan telah menyampaikan proposal dari pihak Amerika Serikat kepada Teheran, sementara Turki turut menyampaikan pesan dalam rangka menjaga komunikasi antar pihak.

Perkembangan ini terjadi di tengah situasi politik global yang masih dipengaruhi warisan ketegangan sejak keluarnya Amerika Serikat dari kese-

pakatan nuklir Iran pada 2018, yang sebelumnya dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015. Sejak saat itu, hubungan kedua negara kembali mengalami eskalasi ketidakpercayaan.

Di dalam negeri Indonesia, respons atas langkah diplomasi tersebut datang dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, yang menilai bahwa fokus utama bukan pada siapa mediatornya, melainkan pada hasil akhir berupa stabilitas dan perdamaian.

“Yang paling utama bukan sekadar siapa yang menjadi mediator, tetapi bagaimana menghentikan potensi eskalasi konflik, melindungi warga sipil, serta membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu bersikap aktif namun tetap terukur dalam merespons dinamika global tersebut, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi nasional.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas internasional untuk terus mendorong penyelesaian damai berb-

agai konflik global melalui pendekatan diplomasi yang konstruktif.

“Indonesia harus terus hadir dengan diplomasi yang sejujuk, tidak memihak, dan berorientasi pada solusi perdamaian dunia,” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataannya, Prabowo bahkan membuka kemungkinan untuk melakukan kunjungan langsung ke Teheran guna memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil di kawasan.

“Jika diminta dan disetujui kedua pihak, Indonesia siap membantu proses mediasi demi terciptanya perdamaian,” demikian garis besar pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan sebelumnya.

Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pihak Iran maupun blok Amerika Serikat terkait tawaran mediasi tersebut, sehingga

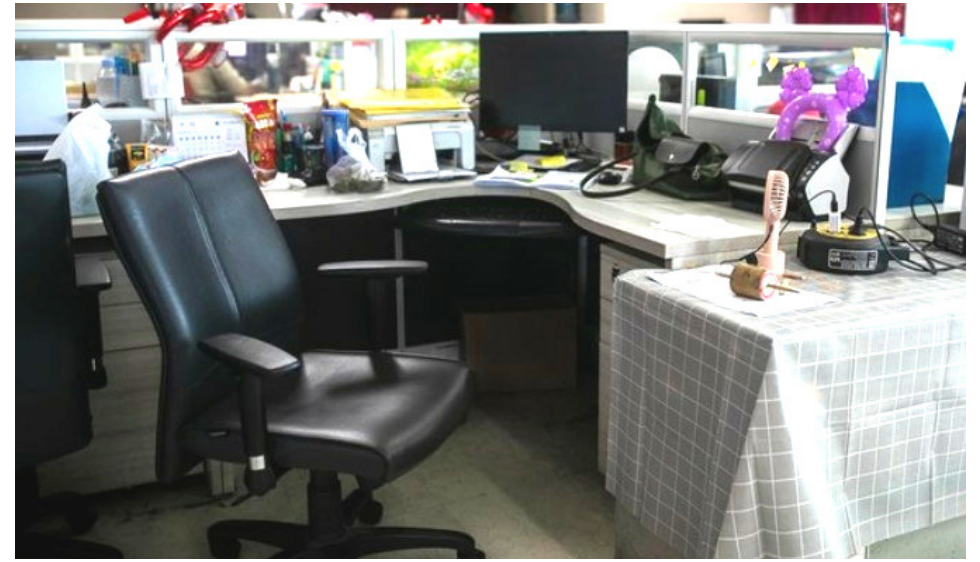
proses diplomasi masih berada pada tahap penajakan awal.

Secara historis, Iran dan Amerika Serikat telah lama berada dalam hubungan yang fluktuatif sejak Revolusi Iran 1979, yang mengubah hubungan strategis kedua negara secara drastis. Ketegangan tersebut beberapa kali mereda, namun kembali memanas terutama terkait isu nuklir dan sanksi ekonomi.

Pakistan dan Turki sendiri dalam beberapa dekade terakhir kerap memainkan peran sebagai jembatan diplomatik dalam berbagai konflik regional, mengingat posisi geopolitik keduanya yang strategis di antara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa keterlibatan mediator pihak ketiga menjadi opsi realistis di tengah stagnasi diplomasi langsung, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing pihak yang berkonflik.

Dengan kondisi tersebut, perkembangan terbaru ini menjadi sinyal bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup, meski tantangan menuju kesepakatan damai masih sangat kompleks dan penuh kepentingan strategis yang saling bertentangan.\*



Ilustrasi. Komisi II DPR meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM tidak diterapkan pada hari Senin dan Jumat.

JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Senin dan Jumat dalam skema penghematan bahan bakar minyak (BBM). Usulan ini diajukan untuk mencegah potensi WFH berubah menjadi libur panjang yang dinilai dapat mengganggu tujuan efisiensi energi nasional.

Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan energi kembali menjadi sorotan setelah Komisi II DPR RI memberikan sejumlah catatan terhadap desain kebijakan tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa skema WFH harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak lanjutan berupa penurunan produktivitas maupun peningkatan mobilitas masyarakat di hari tertentu.

Ia secara khusus menyoroti potensi terjadinya long weekend apabila WFH diterapkan pada awal dan akhir pekan kerja.

“Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin,” ujar Deddy Sitorus, Jumat (27/3).

Menurutnya, pola pelaksanaan WFH yang lebih ideal adalah di tengah pekan kerja, yakni antara Selasa hingga Kamis, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh dijalankan tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta me-

kanisme pengawasan yang ketat di setiap instansi.

“Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apapun. Sebut saja libur dan bukan WFH,” kata Deddy.

Selain aspek pengawasan, ia juga mempertanyakan kesiapan perangkat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung sistem kerja jarak jauh secara penuh.

Menurutnya, tidak semua ASN memiliki akses terhadap perangkat kerja dan jaringan komunikasi yang stabil untuk menunjang produktivitas selama WFH.

“Apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet maupun alat komunikasi yang tersambung secara terus menerus selama jam kerja,” ujarnya.

Deddy juga menekankan bahwa sektor pelayanan publik yang bersifat esensial tidak dapat disamakan dengan unit kerja lain dalam penerapan WFH, karena berpotensi mengganggu layanan masyarakat.

Ia menilai diperlukan pemetaan yang jelas terkait unit kerja yang dapat dan tidak dapat menjalankan sistem kerja dari rumah.

“Bagaimana mengatur bidang atau unit yang bisa melakukan WFH agar ada rasa keadilan? Untuk ini saya menyarankan agar keputusan tentang shift yang WFH diserahkan pada masing-masing instansi dan kepala daerah maupun pimpinan lembaga,” tuturnya.

Di sisi lain, wacana WFH ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terkait pasokan energi, setelah konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak pada jalur perdagangan strategis,

termasuk Selat Hormuz, yang memicu fluktuasi harga minyak dunia.

Pemerintah Indonesia sendiri disebut tengah mengkaji berbagai opsi kebijakan efisiensi energi untuk merespons potensi tekanan pasokan dan kenaikan harga energi global.

Secara historis, Indonesia pernah menerapkan kebijakan kerja fleksibel secara luas saat pandemi COVID-19 pada 2020, ketika ASN dan sektor swasta menjalankan sistem kerja dari rumah untuk menekan penyebaran virus sekaligus menjaga aktivitas ekonomi.

Di tingkat global, sejumlah negara juga pernah menerapkan kebijakan serupa. Filipina, misalnya, menerapkan WFH satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemacetan dan efisiensi energi perkotaan.

Sementara itu, pengalaman krisis energi global pada 1970-an akibat embargo minyak juga pernah mendorong banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan penghematan konsumsi energi, termasuk pengaturan jam kerja dan transportasi publik.

DPR menilai pengalaman historis tersebut dapat menjadi pelajaran bahwa kebijakan penghematan energi harus dirancang secara presisi agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang tidak diinginkan.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPR meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan skema WFH agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi, produktivitas ASN, dan pelayanan publik kepada masyarakat.\*

## Kominfo Sultra Kawal Pembatasan Medsos Anak, Fokus Edukasi Orang Tua

# KOMINFO



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan kesiapan mengawal kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang akan diberlakukan secara nasional mulai 28 Maret 2026.

Kebijakan yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital, termasuk paparan konten tidak layak, perundungan siber, hingga ancaman kebocoran data pribadi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda di tengah pesatnya penetrasi internet di kalangan anak.

"Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai usia dan ancaman di dunia digital," ujar Andi Syahrir di Kendari, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi sosial dan geografis

Sulawesi Tenggara agar implementasinya efektif di lapangan.

Dalam waktu dekat, Kominfo Sultra akan mengintensifkan sosialisasi dengan menggendong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak sekolah sebagai garda terdepan edukasi digital bagi pelajar.

Selain itu, kampanye literasi digital juga akan diperluas melalui media lokal dan kanal resmi pemerintah guna meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua, terkait pentingnya pengawasan penggunaan media sosial.

"Kami tidak hanya fokus pada pembatasan teknis, tetapi juga edukasi agar orang tua memahami peran mereka dalam mendampingi anak di ruang digital," kata Andi.

Upaya lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memastikan kesiapan sistem, termasuk mekanisme verifikasi usia yang akan diterapkan secara nasional.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah celah teknologi seperti penggunaan Virtual Network (VPN) serta kemu-

ngkinan pemalsuan data identitas oleh pengguna.

"Tantangan terbesar adalah memastikan validitas usia pengguna. Teknologi bisa disiasati, sehingga pengawasan tetap harus melibatkan keluarga," ujarnya.

Di sisi lain, kesenjangan literasi digital antara anak dan orang tua di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini.

Secara historis, pembatasan akses digital bagi anak bukan hal baru di tingkat global. Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018 telah menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk persetujuan penggunaan data digital, meski beberapa negara menurunkan menjadi 13 tahun.

Di Amerika Serikat, regulasi Children Online Privacy Protection Act (COPPA) bahkan lebih dulu diberlakukan sejak 1998 untuk melindungi data anak di bawah usia 13 tahun dari eksploitasi platform digital.

Sementara itu di Indonesia, upaya perlindungan anak di ruang digital mulai diperkuat sejak disahkannya Undang-Undang In-

formasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai kebijakan turunan terkait literasi digital dalam satu dekade terakhir.

Data nasional menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh anak meningkat signifikan pascapandemi COVID-19, ketika aktivitas belajar dan hiburan beralih ke platform digital.

Fenomena tersebut turut meningkatkan risiko paparan konten negatif, kecanduan gawai, hingga gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja.

"Secanggih apapun sistem yang dibuat, peran keluarga tetap menjadi benteng utama dalam melindungi anak," tegas Andi.

Ia mengimbau orang tua agar lebih aktif melakukan pendampingan serta tidak menyerahkan sepenuhnya penggunaan gawai kepada anak tanpa kontrol.

Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, penyedia layanan, dan keluarga, kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda. (\*)

## Sekda Sultra Asrun Lio Dorong Partisipasi Publik Awasi Sumber Daya Kelautan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong penguatan pengawasan sumber daya kelautan melalui keterlibatan aktif masyarakat, seiring masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi perikanan daerah yang besar.

Langkah tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang secara resmi dibuka di Kendari, Rabu (4/3/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, yang mewakili Gubernur Andi Sumanerukka, menegaskan bahwa pendekatan pengawasan tidak lagi dapat bersifat sentralistik, melainkan harus melibatkan masyarakat pesisir secara langsung.

"Pengawasan sumber daya kelautan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," ujar Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menyebutkan, Sulawesi Tenggara memiliki wilayah perairan seluas 114.879 kilometer persegi atau sekitar 70 persen dari total wilayah provinsi, dengan potensi perikanan mencapai 1.520.340 ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan potensi tersebut baru mencapai sekitar 17,30 persen, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal disertai pengawasan yang ketat.

Dalam konteks tersebut, keberadaan

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan satuan tugas berbasis masyarakat dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

"Peran Pokmaswas sangat strategis karena mereka berada langsung di lapangan dan memahami kondisi wilayah pesisir," kata Asrun.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, aparat penegak hukum, nelayan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat.

Dominasi nelayan skala kecil di Sulawesi Tenggara yang mencapai sekitar 98 persen dari total 73.935 nelayan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengawasan tersebut.

Menurut Asrun, kelompok nelayan kecil rentan terhadap dampak degradasi lingkungan laut, sekaligus memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

"Tanpa keterlibatan mereka, pengawasan tidak akan efektif karena keterbatasan jangkauan pemerintah," ujarnya.

Secara historis, kebijakan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah menekankan pentingnya pengawasan partisipatif.

Di tingkat internasional, pendekatan serupa juga diadopsi dalam kerangka pengelolaan perikanan

berkelanjutan yang direkomendasikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yang mendorong community-based fisheries management sebagai model efektif menjaga ekosistem laut.

Sejumlah negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang bahkan telah lebih dahulu menerapkan sistem pengawasan berbasis masyarakat untuk mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, tantangan pengawasan semakin kompleks seiring luasnya wilayah perairan serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

"Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan tidak ada praktik-praktik yang merusak ekosistem laut," kata Asrun.

Ia menambahkan, keberlanjutan sumber daya kelautan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap tercipta koordinasi yang lebih efektif dalam implementasi Pergub, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Kegiatan tersebut sekaligus menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat tata kelola sumber daya kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis partisipasi masyarakat. (\*)

## Halal Bihalal Dongkala, Bupati Buton Alvin Akawijaya Ajak Warga Perkuat Silaturahmi



Pewarta: La Harman

BUTON, BP-Kegiatan halal bihalal masyarakat Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat usai perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Acara yang berlangsung di pelataran Masjid Jami Nurul Taqwa, Rabu malam (25/3/2026), itu ditutup dengan suasana penuh keakraban melalui ramah tamah dan saling bermaaf-maafan antarwarga sebagai simbol kembali ke fitrah setelah Ramadan.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si, anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Alvin menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai fondasi

kehidupan bermasyarakat. “Mari kita terus merajut silaturahmi agar hubungan antarwarga tetap terjaga dengan baik,” ujarnya di hadapan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa ketertiban dan keharmonisan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Kita harus bersama-sama menjaga ketertiban kampung agar tetap aman dan kondusif,” kata Alvin.

Kehadiran bupati disambut hangat oleh warga Desa Dongkala dengan penampilan qasidah yang dibawakan oleh remaja setempat, mencerminkan semangat kebersamaan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Alvin juga menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir

dan batin,” tuturnya.

Kegiatan halal bihalal ini sekaligus menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, yang dinilai penting untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.

Tradisi halal bihalal sendiri memiliki akar historis kuat di Indonesia. Secara nasional, praktik ini mulai populer pada masa awal kemerdekaan, terutama ketika Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memperkenalkan konsep silaturahmi nasional guna meredakan konflik politik pasca-revolusi.

Dalam perkembangan global, nilai-nilai rekonsiliasi dan saling memaafkan yang tercermin dalam halal bihalal sejalan dengan tradisi serupa di berbagai negara Muslim, seperti perayaan Idul Fitri yang menekankan perdamaian sosial dan solidaritas umat.

Di tingkat lokal, kegiatan seperti yang digelar di Dongkala menjadi refleksi nyata

bagaimana tradisi tersebut terus hidup dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Selain sebagai ajang silaturahmi, halal bihalal juga berfungsi sebagai sarana memperkuat kohesi sosial, terutama di tengah dinamika sosial dan tantangan pembangunan daerah.

Dengan kehadiran langsung kepala daerah, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mempererat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah.

Acara berlangsung dalam suasana tertib dan penuh kekeluargaan hingga akhir kegiatan, mencerminkan kuatnya budaya silaturahmi yang masih terjaga di tengah masyarakat Buton. (\*)

## Dr Azhari Buka Karang Taruna Cup XXII, Dorong Kemandirian Pemuda Desa



BUTON TENGAH, BP-Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Karang Taruna Cup ke-XXII Tahun 2026 di Lapangan Historia Mone, Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Rabu (25/3/2026) sore. Kegiatan ini menjadi simbol konsistensi masyarakat dalam menggelar ajang olahraga secara mandiri selama lebih dari dua dekade.

Turnamen yang telah memasuki edisi ke-22 ini digelar tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah, namun tetap berjalan berkat partisipasi aktif masyarakat dan pemuda setempat.

Dalam sambutannya, Azhari menilai keberlangsungan turnamen tersebut sebagai bukti nyata kemandirian sosial masyarakat desa dalam membangun kegiatan positif.

“Saya senang melihat kegiatan ini terus berlangsung hingga ke-22 kalinya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu membangun sendiri tanpa bergantung penuh pada pemerintah,” ujar Azhari.

Ia menambahkan, sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga sarana pembinaan karakter, hiburan masyarakat, serta peluang untuk meraih prestasi di tingkat lebih tinggi.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga

menghibur. Bahkan jika dikelola dengan baik, bisa berkembang hingga tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya menjadikan aktivitas olahraga sebagai ruang ekspresi positif bagi generasi muda, sekaligus menghindarkan mereka dari kegiatan yang berpotensi merugikan.

Menurutnya, selain sepak bola, berbagai kegiatan lain seperti bola voli hingga hiburan masyarakat dapat berkembang selama memberikan manfaat sosial yang jelas.

“Yang terpenting adalah memilih kegiatan yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Azhari turut mengingatkan para peserta turnamen untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Sportivitas adalah harga diri bagi setiap pemain sepak bola. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.

Secara historis, turnamen sepak bola berbasis komunitas seperti Karang Taruna Cup memiliki peran penting dalam perkembangan olahraga di Indonesia. Sejak era 1970-an, kompetisi lokal menjadi fondasi lahirnya talenta sepak bola nasional yang kemudian berkembang ke tingkat profesional.

Dalam konteks global, turnamen ko-

munitas juga menjadi akar dari berkembangnya liga-liga besar dunia. Kompetisi lokal di Eropa, misalnya, menjadi cikal bakal lahirnya liga profesional seperti Premier League di Inggris yang kini menjadi salah satu liga paling bergengsi di dunia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan olahraga dari tingkat akar rumput memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan prestasi olahraga suatu negara.

Di Buton Tengah, keberlanjutan Karang Taruna Cup XXII juga memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong masyarakat dalam mendukung kegiatan kepemudaan.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Buton Tengah, Samirun, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat solidaritas sosial, memperkuat identitas komunitas, serta menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkelanjutan.

Dengan semangat kemandirian dan kebersamaan, Karang Taruna Cup XXII di Lakudo diharapkan mampu terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola kegiatan olahraga berbasis masyarakat. (ardi)

## MA Kukuhkan Kolegium Kesehatan Periode 2024-2028, Akhiri Sengketa dan Perkuat Sistem



Laporan: Andina L

JAKARTA, BP- Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 470/G/2024/PTUN. JKT menegaskan legalitas Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028, sekaligus mengakhiri polemik panjang terkait keabsahan keanggotaan lembaga tersebut.

Ketetapan hukum ini disambut positif oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum bagi seluruh tenaga medis dan praktisi kesehatan di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kemenkes, Indah Febrianti, mengatakan putusan tersebut menjadi titik terang dalam memperjelas posisi kelembagaan kolegium sebagai pilar ilmu pengetahuan kesehatan.

"Kami memandang putusan ini sebagai titik terang bagi kepastian hukum kolegium kita. Ini menegaskan bahwa langkah penataan yang dilakukan pemerintah telah sejalan dengan prinsip konstitusional," ujar

Indah di Jakarta, 16 Maret 2026.

Menurut Indah, proses hukum yang berlangsung bukan sekadar sengketa administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional dalam memperkuat sistem kelembagaan profesi kesehatan di Indonesia.

Ia menambahkan, putusan ini juga mempertegas keselarasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menekankan pentingnya keberadaan kolegium sebagai institusi ilmiah yang independen.

"Putusan ini mengonfirmasi bahwa penataan dilakukan untuk menyempurnakan hubungan antara pemerintah dan organisasi profesi, sehingga independensi tetap terjaga," kata Indah.

Lebih jauh, pemerintah menegaskan bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia tetap memiliki otonomi penuh dalam menyusun standar kompetensi dan kurikulum pendidikan secara mandiri tanpa intervensi birokrasi.

Dalam perspektif historis, keberadaan kolegium di Indonesia tidak terlepas dari reformasi sistem

kesehatan pasca disahkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004, yang menegaskan pentingnya standar profesi berbasis keilmuan.

Di tingkat global, model kolegium atau medical colleges telah lama diterapkan di berbagai negara, seperti Royal Colleges di Inggris yang berdiri sejak abad ke-16 dan menjadi rujukan dalam pengembangan standar kompetensi tenaga medis.

Penguatan kelembagaan kolegium di Indonesia juga sejalan dengan rekomendasi World Health Organization yang menekankan pentingnya sistem regulasi profesi yang independen untuk menjamin mutu layanan kesehatan.

Indah menilai dinamika yang terjadi selama proses persidangan harus dimaknai sebagai bagian dari upaya penyempurnaan organisasi agar lebih profesional dan transparan.

"Fokus utama pemerintah adalah memastikan tidak ada intervensi yang mengganggu kemurnian ilmu pengetahuan dalam praktik

kesehatan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolegium bersifat inklusif dengan membuka ruang bagi seluruh pakar, akademisi, dan praktisi dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi.

Dengan adanya kepastian hukum ini, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali bersinergi dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional.

"Kini saatnya kita melampaui perbedaan pandangan dan bergerak bersama menjaga standar pendidikan profesi demi keselamatan pasien," tutur Indah.

Putusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih kondusif, profesional, dan berdaya saing global.

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penguatan sistem kesehatan nasional dengan tetap menjaga independensi profesi medis sebagai pilar utama pelayanan kesehatan di Indonesia. (\*)

## Kemenkes Dorong Temukan Kasus Kusta Lebih Banyak untuk Kendalikan Penyakit



JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat eliminasi kusta melalui pendekatan komprehensif yang mencakup deteksi dini, pengobatan tuntas, serta perlindungan bagi kelompok kontak erat pasien.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Kusta Sedunia yang digelar di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi, Jakarta, Rabu (11/3), sebagai bagian dari kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kusta.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menekankan bahwa momentum ini menjadi penting untuk menghapus stigma sosial yang selama ini melekat pada penyintas kusta.

"Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran publik dan menghilangkan diskriminasi terhadap penyintas kusta," ujar Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit menular yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan kini dapat disembuhkan secara medis.

"Kusta sering dikaitkan dengan kemiskinan dan stigma, padahal secara ilmiah penyebabnya jelas, yaitu bak-

teri, dan pengobatannya sudah tersedia," kata Budi.

Ia menjelaskan, strategi utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan penemuan kasus secara aktif di masyarakat, sehingga pasien dapat segera diobati dan rantai penularan dapat dihentikan.

"Jangan takut jika kasus yang ditemukan meningkat. Itu justru menandakan sistem deteksi kita berjalan efektif," ujarnya.

Kemenkes juga memperkuat program skrining melalui inisiatif Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan lebih dini, terutama di daerah dengan risiko tinggi.

Selain itu, pemerintah mendorong pemeriksaan tambahan berbasis genetik di wilayah Indonesia Timur guna mendeteksi kemungkinan resistensi obat, sehingga terapi dapat disesuaikan secara tepat.

Menurut Budi, pengobatan kusta tergolong sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, selama pasien disiplin menjalani terapi hingga tuntas.

"Obatnya tersedia dan pengobatannya bisa selesai. Yang penting adalah kepatuhan pasien dalam menjalani terapi," kata dia.

Secara historis, kusta atau lepra telah dikenal sejak lebih dari 3.000 tahun lalu dan pernah menjadi salah satu penyakit paling ditakuti di dunia karena menyebabkan kecacatan serta stigma sosial

yang kuat. Organisasi World Health Organization mencatat bahwa secara global jumlah kasus kusta baru terus menurun sejak diberlakukannya terapi kombinasi multidrug therapy (MDT) pada 1980-an.

Di Indonesia, program eliminasi kusta telah berlangsung sejak dekade 1990-an dengan capaian penurunan prevalensi secara signifikan, meskipun beberapa wilayah masih mencatat temuan kasus baru setiap tahun, terutama di kawasan timur.

Dalam rangkaian kegiatan peringatan tahun ini, Kemenkes juga menggelar berbagai program edukasi, skrining mandiri keluarga, serta lomba penulisan bagi jurnalis untuk meningkatkan literasi publik mengenai kusta.

Penghargaan turut diberikan kepada sejumlah puskesmas yang aktif menemukan kasus baru, termasuk di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Brebes, dan Kota Jayapura, sebagai bentuk apresiasi atas upaya deteksi dini di tingkat layanan primer.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap sinergi lintas sektor dapat semakin kuat dalam mendukung target eliminasi kusta secara nasional.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak ragu memeriksakan diri apabila menemukan gejala kusta, serta berperan aktif dalam menghapus stigma agar pasien dapat memperoleh pengobatan secara cepat dan tuntas. (\*)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p> <p>Harian Pagi <b>Baubau Post</b></p> <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasctio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Komisi III DPR Bahas Dugaan Mark Up Anggaran Video Desa di Karo



Ketua Komisi III, Habiburokhman.

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Senin (30/3) pukul 09.00 WIB untuk membahas kasus dugaan penggelembungan anggaran yang menyeret seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu.

Agenda tersebut digelar di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses hukum yang dinilai sebagian kalangan mengandung potensi ketidakadilan, terutama dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan jasa kreatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa RDPU ini merupakan respons atas desakan masyarakat yang mempertanyakan penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum.

"RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Kasus yang menyeret Amsal

Sitepu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022.

Dalam perkara tersebut, Amsal melalui perusahaannya, CV Promiseland, disebut menetapkan biaya pembuatan video sebesar Rp30 juta untuk setiap desa yang menjadi objek pekerjaan.

Berdasarkan hasil audit yang digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp202.161.980 akibat praktik penggelembungan anggaran tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun. Ia didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di tengah proses hukum itu, Komisi III DPR menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan substantif dalam

sistem peradilan pidana nasional, khususnya setelah pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum, bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik belaka," kata Habiburokhman.

Ia juga menekankan bahwa penanganan perkara korupsi semestinya mengutamakan optimalisasi pengembalian kerugian negara, terutama dalam kasus yang berdampak luas pada keuangan publik.

"Kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu," ujarnya menambahkan.

Sebagai konteks, Indonesia telah memiliki landasan hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperkuat dengan revisi pada

2001. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002 juga menjadi tonggak penting dalam upaya sistematis pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di tingkat global, isu serupa juga menjadi perhatian melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi pada 2003, yang menekankan pentingnya pencegahan, penindakan, serta pemulihan aset dalam kasus korupsi lintas negara.

Sementara itu, dalam perkembangan industri kreatif internasional, persoalan penentuan harga jasa kreatif seperti videografi, desain, dan produksi konten digital kerap menjadi perdebatan karena tidak memiliki standar baku yang seragam di berbagai negara.

RDPU Komisi III DPR ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi serta memperkuat perspektif hukum yang berimbang antara kepastian hukum, perlindungan pelaku usaha kreatif, dan kepentingan negara dalam pengelolaan keuangan publik. (\*)

## Operasi Damai Cartenz Amankan 4 Pelaku Peredaran Amunisi Ilegal



Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz menangkap empat terduga penyuplai amunisi ilegal kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

### Laporan: Hadi

SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap empat orang terduga pelaku yang diduga menjadi pemasok amunisi ilegal kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua. Penangkapan ini dilakukan dalam operasi terpisah di wilayah Jayapura dan sekitarnya pada 25-26 Maret.

Operasi penindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya aparat keamanan untuk memutus rantai pasokan senjata dan amunisi ilegal yang selama ini diduga memperkuat aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Papua.

Keempat tersangka masing-masing berinisial KO (45), SMM (40), HM (53), dan AKW (51). Mereka diamankan oleh aparat dalam waktu dan lokasi yang berbeda setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh aparat keamanan.

Wakil Ketua Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, AKBP Andria, menjelaskan bahwa para pelaku memiliki peran berbeda dalam jaringan distribusi amunisi ilegal tersebut.

"Keempat tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda dalam jaringan ini," ujar Andria kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tiga tersangka yakni KO, SMM, dan AKW berperan sebagai perantara atau fasilitator dalam transaksi amunisi ilegal, sementara

HM diduga berperan sebagai penyedia atau penjual amunisi.

Dalam proses penangkapan, aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komunikasi, kendaraan operasional, serta senjata api rakitan yang diduga digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

Seluruh tersangka kini telah ditahan di Polda Papua dan tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya aktor lain dalam rantai distribusi.

Penyidik juga menelusuri alur distribusi amunisi ilegal tersebut untuk memastikan tidak ada jaringan lintas wilayah yang terlibat dalam mendukung kelompok bersenjata di Papua.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 306 jo Pasal 20 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tentang kepemilikan senjata ilegal serta perbantuan tindak pidana.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa penindakan terhadap jaringan senjata dan amunisi ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Penegakan hukum ini dilakukan secara profesional dan terukur sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat," ujarnya.

Menurut Faizal, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan

di Papua yang selama bertahun-tahun menghadapi tantangan konflik bersenjata di beberapa wilayah.

Secara historis, peredaran senjata ilegal di wilayah konflik seperti Papua bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga bagian dari fenomena global. Dalam berbagai konflik di dunia, termasuk di beberapa wilayah Afrika dan Timur Tengah, jalur distribusi senjata ilegal kerap menjadi faktor yang memperpanjang eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian.

Di Indonesia sendiri, pemerintah secara konsisten melakukan penindakan terhadap jaringan senjata ilegal, terutama di daerah-daerah rawan konflik, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional.

Satgas Operasi Damai Cartenz juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas peredaran senjata maupun amunisi ilegal dalam bentuk apa pun karena selain melanggar hukum, juga berpotensi membahayakan keselamatan warga sipil.

Operasi ini menegaskan komitmen aparat keamanan dalam menutup celah distribusi senjata ilegal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua serta memperkuat penegakan hukum di wilayah tersebut. (\*)

## Momentum Baru, Polres Baubau Tingkatkan Disiplin Lewat Binrohtal



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Pasca perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah dan berakhirnya rangkaian pengamanan arus mudik, Polres Baubau menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) sebagai langkah awal memperkuat integritas dan kesiapan personel dalam menghadapi rutinitas tugas pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 26 Maret 2026, tersebut dipusatkan di Masjid Al Iman Polres Baubau dan dimulai pukul 08.30 WITA. Seluruh jajaran, mulai dari pejabat utama hingga anggota, mengikuti kegiatan ini dengan penuh khidmat.

Binrohtal perdana pasca-Lebaran ini menjadi bagian dari strategi internal untuk memulihkan kondisi psikologis dan spiritual personel setelah menjalani tugas intensif selama Operasi Ketupat, yang setiap tahun menjadi agenda nasional dalam pengamanan hari raya.

Kapolres Baubau, Mayestika Hidayat, menegaskan bahwa momentum Idul Fitri harus dimaknai sebagai titik

awal pembaruan diri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Idul Fitri bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi harus menjadi refleksi untuk memperbaiki kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas," ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai yang telah ditempa selama bulan Ramadan, seperti disiplin, kejujuran, dan kesabaran, agar tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

"Saya ingin nilai kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan yang kita latih selama Ramadan benar-benar tercermin dalam pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Pelaksanaan Binrohtal dilakukan secara serentak dengan tetap menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Personel beragama Islam mengikuti kegiatan di masjid, sementara anggota Nasrani melaksanakan ibadah di ruangan terpisah yang telah disiapkan.

Kapolres menilai penguatan mental

menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas emosi personel, terutama setelah menghadapi tekanan kerja selama masa pengamanan Lebaran yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

"Penguatan mental ini penting agar personel tetap profesional dan humanis dalam memberikan perlindungan dan pengayoman," katanya.

Secara historis, kegiatan pembinaan rohani di institusi kepolisian telah menjadi bagian dari program pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program ini berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi pasca-1998 yang menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik yang bersih.

Dalam konteks nasional, Operasi Ketupat sendiri merupakan operasi kemanusiaan yang rutin digelar Polri sejak dekade 1990-an untuk mengamankan arus mudik dan Intensitas operasi ini meningkat

signifikan seiring pertumbuhan mobilitas masyarakat setiap tahun.

Sementara itu, secara global, pendekatan pembinaan mental dan spiritual bagi aparat penegak hukum juga menjadi praktik umum. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, program serupa dikenal sebagai "wellness program" atau "spiritual support service" untuk menjaga kesehatan mental personel kepolisian.

Kegiatan Binrohtal di Polres Baubau berlangsung selama kurang lebih satu jam dan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Baubau berharap dapat mengawali masa kerja pasca-Lebaran dengan semangat baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas. (\*)

## Bapperida Baubau Matangkan Program 2027 Lewat Desk OPD Terintegrasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Baubau telah menuntaskan pemaparan dalam forum Desk OPD yang digelar di Aula Rapat Kantor Wali Kota Baubau. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus memastikan sinkronisasi program antarinstansi.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi OPD terakhir yang mengikuti desk dalam rangkaian kegiatan tersebut. Forum ini turut dihadiri para staf ahli Wali Kota Baubau, yakni Dr. Sunaryo Mulyo, M.T., Drs. Tamsil Tamim, M.Si., serta Zakir, S.E., M.Si., yang memberikan sejumlah catatan strategis terhadap penyempurnaan program kerja.

Pelaksanaan desk dilakukan secara bertahap selama beberapa hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setiap OPD diberi kesempatan untuk memaparkan rencana program sekaligus mengevaluasi capaian kinerja tahun berjalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Baubau, Mohamat Abduh, STP., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

"Desk ini menjadi ruang bersama untuk memastikan seluruh program yang dis-

usun benar-benar terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya usai mengikuti sesi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat (13/03/2026).

Menurutnya, fokus utama kegiatan ini adalah menajamkan usulan program pembangunan tahun 2027 sekaligus mengidentifikasi kemungkinan perubahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026.

"Jadi, kita tidak hanya merancang program ke depan, tetapi juga melihat apa yang perlu diperbaiki di tahun berjalan agar lebih efektif," kata Abduh.

Ia menambahkan, kesepahaman antar-OPD menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam konteks keterbatasan fiskal daerah.

"Kita membangun kesepahaman bersama seluruh OPD. Kita juga mengukur kemampuan keuangan daerah, apakah cukup untuk mendukung seluruh rencana tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Abduh berharap melalui koordinasi yang intensif, berbagai hambatan teknis maupun administratif yang kerap muncul dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.

Secara historis, mekanisme desk OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang mulai diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Regulasi ini menekankan pentingnya integrasi an-

taranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam konteks global, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui pendekatan performance-based budgeting, yakni sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai berkembang sejak dekade 1990-an di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran publik.

Indonesia sendiri mulai mengadopsi pendekatan tersebut secara bertahap sejak era reformasi, khususnya untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan selesainya seluruh rangkaian desk OPD, Pemerintah Kota Baubau optimistis perencanaan pembangunan tahun 2027 akan lebih terarah, terukur, dan realistis. Sinkronisasi lintas OPD diharapkan mampu menghasilkan program yang tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Ke depan, hasil desk OPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (\*)